

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Nama Atasan PPID Pembantu : dr. Herlin Ferliana, M.Kes.
 Nama Unit/Satker yang menguasai : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
A	SEKRETARIAT					
1	PERATURAN					
a	Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS	mengatur tentang ketentuan Disiplin PNS beserta jenis hukumannya	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2010	Softcopy
b	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil	mengatur tentang penilaian kinerja berdasarkan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Softcopy
c	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	mengatur tentang penghitungan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Softcopy
d.	Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53/ 2010 tentang Disiplin PNS	mengatur tentang ketentuan ketentuan pelaksanaan PP No. 53/ 2010 tentang Disiplin PNS	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2010	Softcopy
e.	Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.	mengatur tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Softcopy
f	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74/ 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang SOTK Dinkes Jatim	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2016	Softcopy
g	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56/ 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2018	Softcopy
e.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang Manajemen Kinerja Pegawai terkait dengan pemberian TPP Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2018	Softcopy
2	PROFIL BADAN PUBLIK					
a	RENSTRA 2019-2024	Informasi tentang alamat kantor dinas kesehatan Prov Jatim, Ruang lingkup Kegiatan, Visi dan misi, tujuan, sasaran, Strategi & kebijakan, Tugas & fungsi, Struktur Organisasi	Seksi Penyusunan Program dan Anggaran, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	4 Tahun sekali atau setiap ada perubahan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hard copy & soft copy
b.	Profil singkat pejabat struktural Tahun 2020	Informasi tentang nama Pejabat eselon IV, III, dan II beserta tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Minimal 1 Tahun sekali atau setiap ada perubahan pejabat	Softcopy

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
3	RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN					
a	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019	Informasi tentang rekapitulasi nama program dan/atau kegiatan, jumlah anggaran, sumbernya, target capaian, penanggungjawab dan jadwal pelaksanaan	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1 Tahun sekali, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Softcopy
b	Tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi JFT kesehatan	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur bulan Januari dan Juli	Hardcopy & Softcopy
c	Tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar serta surat keterangan ijin belajar	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy
d.	Tata cara dan syarat usulan pensiun dan Layanan Klaim Otomatis ke Taspen	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan pensiun bagi pensiun BUP, janda/duda, dan pensiun atas permintaan sendiri	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy
e.	Tata cara dan syarat usulan Satyalencana	informasi mengenai tata cara dan syarat usulanSatyalencana bagi PNS yang sudah memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy
f	Tata cara dan syarat usulan Kenaikan Gaji Berkala	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan gaji berkala	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy
g	Daftar kelompok budaya kerja Dinas dan UPT	Nama, judul, dan uraian risalah kelompok budaya kerja yang dibentuk di Dinas Kesehatan Prov Jatim dan UPT	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy
4	INFORMASI PENGADAAN					
a.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2020	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Setiap ada proses pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy di papan pengumuman Dinas Kesehatan Prov Jatim dan situs resmi http://dinkesjatimprov.go.id
b.	Ringkasan Laporan Pengadaan Barang & Jasa tahun 2019	Informasi tentang nama pengadaan dan penyedia jasanya	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy
c	Daftar Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Informasi berisi data tenaga kesehatan yang berada di Dinkes dan UPT	Seksi P3SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kabid PSDK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy
d.	Daftar Tenaga Bidan, dokter/dokter gigi PTT di Provinsi Jawa Timur	Informasi tentang formasi tenaga bidan PTT Pusat, Dokter/Dokter Gigi PTT Pusat yang berada di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy
5	Daftar SOP					
a	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	Informasi tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) program/kegiatan yang dilakukan dari semua Subag/Seksi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari nama-nama beserta uraian singkat serta pejabat yang menetapkan	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy dan hardcopy
b	SOP Permohonan Informasi	Informasi tentang prosedur permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy
c	SOP Pelayanan Keberatan	Informasi tentang prosedur permohonan keberatan secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy
d.	SOP Permohonan pengaduan	Informasi tentang prosedur pengajuan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy
e.	SOP Penanganan Pengaduan	Informasi tentang tata cara memberikan layanan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
	RINGKASAN KINERJA					
6	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019	Laporan Pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Secara eksternal, LAKIP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya good governance. Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan instansi tersebut.	Tim pengelola SAKIP berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Februari, tahun+1 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy
b	Ringkasan LKPJ (laporan Kerja Pertanggungjawaban) 2019	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LKPJ mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Januari, Tahun+1, di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy
c	Ringkasan Laporan Tahunan 2018	Laporan berkala setiap tahun yang berisi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perkembangan dan hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja yang mencakup resume kegiatan, perbandingan target dan capaian, upaya terobosan/inovasi, serta sumber daya yang dimiliki.	Pengelola Program	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	April, 1 Tahun sekali di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy
d	Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKGP3) / Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).	Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program yang dibuat setiap triwulan.	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan bulan 3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy & Soft Copy
7	LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK					
a	Laporan permohonan Informasi	Informasi tentang Jumlah Permintaan informasi; Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi; Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan atau ditolak dan alasan penolakan informasi	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	6 Bulan, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy & Hardcopy
b	Daftar Informasi Publik	Informasi yang dikuasai oleh PPID Pembantu Dinkes Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1 Tahun, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy & Hardcopy
c	Daftar kewenangan penanganan pengaduan	Informasi tentang batasan kewenangan pengaduan yang dilayani atau tidak	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy
B	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT					
1	PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli remaja)	PKPR adalah pelayanan kesehatan yang ramah remaja		Seksi KGM Program ARU Dinkes Prov Jatim	Seksi KGM Tahun 2019	- Leaflet - X Benner
		Prinsip Pelayanan : •Menjaga kerahasiaan klien remaja !! •Prosedur pelayanan sesederhana mungkin •Ada layanan konseling untuk curhatnya remaja •Remaja terlibat dalam PKPR melalui konselor sebaya •Jam pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan remaja •Petugasnya baik, sabar dan ramah (WOW GITU LOH...)				
		Lokasi : •PKPR didalam gedung Puskesmas (poli PKPR) •PKPR diluar gedung Puskesmas (panti, lapas anak, UKS/Usaha Kesehatan Sekolah, dll)				
		Jenis Pelayanan : •Promotif : Komunikasi Informasi Edukasi, Konselor Sebaya •Preventif : PKHS atau ketrampilan sosial •Kuratif& rehabilitatif : konseling, pengobatan, laboratorium, rujukan				

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
		Masalah yang dapat ditangani : •Masalah gizi •Masalah pubertas •Kesehatan reproduksi •Kekeerasan terhadap anak •Masalah depresi, cemas berlebih, kesulitan belajar, masalah perilaku seksual, ingin bunuh diri, gangguan emosi, kecanduan gadget, penyalahgunaan NAPZA&rokok, dll.....				
2	Aplikasi BUAIAN	Aplikasi BUAIAN berfungsi sebagai sarana konsultasi kesehatan ibu dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan	Seksi KGM Program KIA Dinkes Prov Jatim	Koordinator Program KIA Dinkes Prov Jatim	Seksi KGM Tahun 2019	Media konsultasi melalui chatting dengan dokter spesialis melalui aplikasi BUAIAN
3	Buku Pedoman Umum Pelaksanaan GERMAS	Indonesia telah mengalami pola perubahan penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM). Melalui Inpres No 1 tahun 2017 semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menentukan Kebijakan GERMAS sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan tahap tahap kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang.	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2020	Softcopy dan Hardcopy
4	Roll Banner GERMAS	Berisi tentang informasi 3 kegiatan umum GERMAS yaitu aktifitas fisik, makan sayur dan buah, cek kesehatan secara berkala.	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2019, 2020	Softcopy
5	Tempat makan " Isi Piringku "	Informasi porsi makan dalam satu piring sebagai pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna yang selama ini dikenal masyarakat, yang berisi makanan pokok 2/3 dari 1/2 piring, lauk pauk 1/3 dari 1/2 piring, sayur 2/3 dari 1/2 piring	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2019	Softcopy
6	Poster : Etika batuk, Ayo Cegah Penularan COVID - 19, Cegah penularan COVID - 19 melalui PHBS	Berisi informasi tentang etika batuk yang benar, perilaku yang benar untuk mencegah penularan COVID - 19	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020	Softcopy
7	Baliho - Budaya 5 R di tempat kerja, Etika batuk yang benar dan cegah corona -19 melalui PHBS	Informasi tentang perilaku etika batuk yang benar, perilaku yang harus dibudayakan di tempat kerja dan jenis jenis perilaku PHBS untuk mencegah penularan COVID - 19	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020	Softcopy
8	Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui RADIO	Informasi program kesehatan prioritas yang dipublikasikan melalui RADIO dengan jangkauan Gerbang kertasusila	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (TB II dan III)	Softcopy
9	Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media sosial Youtube	Informasi program kesehatan prioritas yang akan disebarakan melalui media sosial youtube	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (TB II)	Softcopy dan Hardcopy
10	Penyebarluasan informasi kesehatan di terminal Bus Antar Kota	Informasi program kesehatan prioritas yang akan ditempatkan di area terminal Bus Antar Kota (Rencana term Bungurasih dan Malang)	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (TB II dan III)	Softcopy
11	Kampanye Kesehatan melalui Media Cetak Koran	Informasi program kesehatan yang dipublikasikan melalui koran jangkauan Jawa Timur	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (TB II)	Hardcopy
12	Program UKBM On TV	kegiatan ini untuk meliput kegiatan kegiatan UKBM unggulan / berprestasi seperti Desa Siaga, Poskestren dan Saka Bakti Husada dan akan dipublikasikan untuk masyarakat	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (II dan III)	Softcopy
13	Kampanye Kesehatan melalui media Elektronik TV	Penayangan ulang video Creativ Health campaign sebanyak 12 kl dengan tema yang akan ditentukan (menyusul)	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 (II dan III)	Softcopy
14	Alur Rujukan Pasien Covid - 19 di Jawa Timur	Program pelayanan pasien covid -19 dalam memperoleh pelayanan kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2020/RS Rujukan	Hard copy/Soft Copy
15	Tata Laksana Pembiayaan Penanganan Covid - 19	Program pembiayaan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi pasien covid - 19 di Jawa Timur	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2020/RS Rujukan	Hard copy/Soft Copy/online

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
16	Surveilans dan Respon	Dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat tentang status pasien covid - 19 yang meliputi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Kontak Erat (KE), Pasien Konfirmasi. Masyarakat diharapkan mengetahui masing-masing definisi.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online
17	Manajemen Klinis	Manajemen klinis ditujukan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien ISPA berat baik dewasa dan anak di rumah sakit ketika dicurigai adanya infeksi COVID-19. Bab manifestasi klinis ini tidak untuk menggantikan penilaian klinis atau konsultasi spesialis, melainkan untuk memperkuat manajemen klinis pasien berdasarkan rekomendasi WHO terbaru. Rekomendasi WHO berasal dari publikasi yang merujuk pada pedoman berbasis bukti termasuk rekomendasi dokter yang telah merawat pasien SARS, MERS atau influenza berat	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit Rujukan	2020/Rumah Sakit Rujukan	Hard copy/Soft Copy
18	Kegiatan Surveilans dan Karantina	Upaya surveilans merupakan pemantauan yang berlangsung terus menerus terhadap kelompok berisiko. Sedangkan karantina merupakan pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kegiatan surveilans merupakan bagian tidak terpisahkan dari karantina, selama masa karantina, surveilans dilakukan untuk memantau perubahan kondisi seseorang atau sekelompok orang.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Kab/Kota	Hard copy/Soft Copy
19	Deteksi Dini dan Respon Kegiatan	Deteksi Dini dan Respon Kegiatan deteksi dini dan respon dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya OTG, ODP, PDP maupun kasus konfirmasi COVID-19 dan melakukan respon adekuat. Upaya deteksi dini dan respon dilakukan sesuai perkembangan situasi COVID-19 dunia yang dipantau dari situs resmi WHO atau melalui situs lain: <ul style="list-style-type: none"> Situs resmi WHO (https://www.who.int/) untuk mengetahui negara terjangkit dan wilayah yang sedang terjadi KLB COVID-19. Sumber lain yang terpercaya dari pemerintah www.infeksiemergeng.kemkes.go.id, www.covid19.kemkes.go.id dan lain-lain. Sumber media cetak atau elektronik nasional untuk mewaspadaai rumor atau berita yang berkembang terkait dengan COVID-19. 	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020/Dinas Kesehatan Kab/Kota	Hard copy/Soft Copy
20	Deteksi Dini dan Respon Wilayah	Deteksi dini di wilayah dilakukan melalui peningkatan kegiatan surveilans rutin dan surveilans berbasis kejadian yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya indikasi OTG, ODP, dan PDP COVID-19 yang harus segera direspon. Adapun bentuk respon dapat berupa verifikasi, rujukan kasus, investigasi, notifikasi, dan respon penanggulangan. Bentuk kegiatan verifikasi dan investigasi adalah penyelidikan epidemiologi. Sedangkan, kegiatan respon penanggulangan antara lain identifikasi dan pemantauan kontak, rujukan, komunikasi risiko dan pemutusan rantai penularan.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/lisan
C	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT					
1	PERATURAN					
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/PER/III/ 2010 tentang Pengendalian Vektor	Berisi tentang pengaturan penyelenggaraan, perizinan, pembiayaan, peran serta masyarakat, monev serta pembinaan dan pengawasan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Maret 2010	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Berisi tentang penetapan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penetapan dan pencabutan penetapan daerah KLB/wabah, tata cara penanggulangan dan tata cara pelaporan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 12 Oktober 2010	Softcopy

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV / AIDS	Berisi tentang penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2013	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak	Berisi tentang acuan tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi dan pemangku kepentingan terkait pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2013	Softcopy
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV	Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV wajib menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, pengelola/ pengurus tempat kerja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2014	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Berisi tentang penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular, penyelenggaraan, sumber daya kesehatan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2015	Softcopy
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral	Pengobatan ARV merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 11 November 2014	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus	Berisi tentang penyelenggaraan penanggulangan hepatitis virus (upaya promkes, deteksi dini, surveilans, penanganan/p'obatan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Juli 2015	Softcopy
a	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis	Berisi tentang upaya penanggulangan tuberculosis (promkes, surveilans TB, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 22 Desember 2016	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia	Berisi tentang upaya intensifikasi kegiatan Penanggulangan Frambusia	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 25 Januari 2017	Softcopy
a	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak	Berisi tentang upaya eliminasi PPIA (penetapan dan pelaksanaan strategi Eliminasi Penularan, penetapan dan pelaksanaan peta jalan dan intensifikasi kegiatan Eliminasi Penularan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 13 November 2017	Softcopy
b	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Januari 2019	Softcopy
a	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta	Berisi tentang penanggulangan kusta melalui upaya pencegahan dan pengendalian melalui kegiatan promosi kesehatan, surveilans, kemoprofilaksis dan tata laksana penderita kusta	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 18 April 2019	Softcopy
b	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur	Berisi tentang karakteristik dan cara penularan DBD, upaya pengendalian, pencegahan, surveilans, pengasapan, larvasidasi, penanganan penderita, KLB DBD, pokjnal, PSM dan pelaporan pembinaan pengawasan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, 22 November 2011	Softcopy
a	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya, 28 Desember 2018	Softcopy
b	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV	PNPK HIV merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 19 Februari 2019	Softcopy

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBIT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
c	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/322/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran <u>Tata Laksana Hepatitis B</u>	PNPK Hepatitis B merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 10 Juni 2019	<i>Softcopy</i>
d	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/681/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran <u>Tata Laksana Hepatitis C</u>	PNPK Hepatitis C merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 18 Oktober 2019	<i>Softcopy</i>
e	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran <u>Tata Laksana Tuberkulosis</u>	PNPK Tuberkulosis merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 02 Desember 2019	<i>Softcopy</i>
f	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/813/2019 tentang <u>Formularium Nasional</u>	merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 31 Desember 2019	<i>Softcopy</i>
2	RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN					
a	Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	Ada 8 kab/ko yang sudah mempunyai SK G1R1J sebagai bentuk implementasi G1R1J	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	<i>Softcopy</i>
b	Investasi Kontak Erat	1 pasien tuberkulosis (TB) yang terkonfirmasi bakteriologis, dicari minimal 20 kontak erat, sudah dilaksanakan di 38 kab/kota	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	<i>Softcopy</i>
c	Intensifikasi penemuan kasus kusta baru (<i>Intesified Case Finding</i>)	Pencarian penderita kusta baru di lokus endemis kusta dengan melibatkan kepala keluarga dan kader kesehatan di 12 kab (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Gresik, Jember)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	<i>Softcopy</i>
3	PENYAKIT MENULAR					
a	Waspada Penyakit HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit HIV AIDS dan IMS	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>
b	Waspada Penyakit KUSTA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Kusta	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>
c	Waspada Penyakit TB	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit TB	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>
d	Waspada Penyakit DEMAM BERDARAH	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Demam Berdarah	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>
e	Waspada Penyakit ISPA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit ISPA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>
f	Waspada Penyakit DIARE	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Tata Laksana Diare dan Cara Pencegahan Penyakit Diare	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	<i>Softcopy</i>

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBIT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
g	Waspada Penyakit TYPHOID	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Typhoid	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy
h	Waspada Penyakit HEPATITIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Hepatitis (A, B dan C)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy
i	Waspada Penyakit MALARIA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy
j	Waspada Penyakit LEPTOSPIROSIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy
k	POSBINDU PTM					
l		Posbindu PTM adalah kegiatan pengendalian faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Program Posbindu PTM ditujukan kepada seluruh masyarakat sehat dan berisiko yang berusia dari 15 tahun ke atas. Posbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Posbindu PTM diperlukan untuk dapat mengendalikan faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang terdapat pada setiap individu agar tidak berkembang menjadi Penyakit Tidak Menular.	Dinas Kesehatan Provinsi Bidang P2P Seksi P2PTM dan Keswa	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Softcopy
D	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN					
1	Kepesertaan JKN penduduk Jawa Timur Tahun 2019	Informasi ini menggambarkan cakupan kepesertaan penduduk Jawa Timur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) dari setiap jenis kepesertaan PBI / Non PBI per Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, BPJS Kesehatan Kedeputusan wilayah Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell
2	Status Akreditasi Puskesmas di Jawa Timur	Informasi ini menggambarkan hasil pelaksanaan survei akreditasi puskesmas yang ada di provinsi Jawa Timur dan status akreditasinya, dasar, madya, utama dan paripurna.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Semesteran (per enam bulan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell / Power Point
3	Data Keluarga Sehat di Jawa Timur (PIS PK)	Informasi ini menggambarkan hasil kunjungan keluarga, data IKS, presentase keluarga sehat, tidak sehat, pra sehat di Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang diambil dari dashboard aplikasi KS Kementerian Kesehatan RI	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell / Power Point

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
4	Jumlah FKTP	Informasi ini menggambarkan jumlah FKTP (puskesmas,ustu, polindes, ponkesdes) di Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell
5	Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak Tahun 2020	Informasi ini menggambarkan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Kepulauan, dokumentasi, jumlah yang sudah dilayani	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Semesteran (per enam bulan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Powerpoint, Word
6	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mencegah Stunting	<p>1. Penyebab stunting adalah kombinasi dari beberapa faktor yaitu :</p> <p>a. asupan makanan yang kurang bergizi dalam waktu yang lama</p> <p>b. pertumbuhan yang tidak baik saat dalam kandungan</p> <p>c. tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori</p> <p>d. perubahan hormon yang dipicu oleh stres</p> <p>e. sering menderita infeksi diawal kehidupan seorang anak</p> <p>2. Pemanfaatan Asman TOGA dan Akupresur dalam mencegah stunting :</p> <p>a. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan nafsu makan</p> <p>b. ramuan untuk anemia</p> <p>c. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan produksi ASI</p> <p>d. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan daya tahan tubuh</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	Kementerian Kesehatan RI , 2019	Brosur
7	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mengatasi Susah Tidur dan Stress	<p>akupresur untuk mengatasi stress dapat dilakukan pemijatan pada (1) tiga jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam; (2) lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam, segaris dengan jari kelingking; (3) di belakang kepala, 1 ibu jari di atas batas rambut bagian belakang</p> <p>ramuan terdiri dari biji pala, madu, dan air panas. Cara pembuatan 1/5 bagian biji pala ditumbuk halus. Seduh dengan 1 cangkir air hangat dan madu 1 sendok makan. Diminum 1-2 kali sehari dalam keadaan hangat</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018	Flyer
8	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mengatasi Sakit Kepala / Pusing	<p>akupresur untuk mengatasasakit kepala/pusing dapat dilakukan pemijatan pada (1) daerah kepala bagian depan, yang terletak di lekukan tulang pelipis, sejajar dengan sudut mata lua; (2) di belakang kepala, 1 ibu jari tangan dan di atas batas rambut bagaian belakan; (3) untuk daerah puncak kepala, dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang terletak di puncak kepala</p> <p>ramuan terdiri dari bawang putih, pegagan/ antanan dan air. Cara pembuatan bawang putih dimemarkan, campurkan semua bahan kemudian rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum 3 kali sehari masing-masing 1/3 gelas. Ramuan hanya untuk dewasa</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018	Flyer
9	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Menyusui	<p>akupresur untuk meningkatkan produksi ASI dapat dilakukan pemijatan pada (1) perpotongan garis tegak lurus dari sudut kuku bagian kelingking dan (2) terletak 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering</p> <p>ramuan terdiri temulawak, meniran, pegagan, dan air. Cara pembuatan, campurkan semua bahan kemudian rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum 2 kali sehari pagi dan menjelang</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018	Flyer
10	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Meningkatkan daya Tahan Tubuh	akupresur untukmeningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan pemijatan pada (1) 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering; (2) 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Pijatan ini dilakukan dengan kondisi posisi kaki disilangkan ke atas paha; (3) punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Kementerian Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018	Flyer

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBIT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
		ramuan terdiri dari jahe emprit/jahe merah, pegagan, temulawak, gula merah, dan air. Cara pembuatan jahe dan temulawak dimemarkan. Pegagan dan gula merah dipotong kecil-kecil. Semua bahan dicampur dan direbus di dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum hangat-hangat 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Ramuan ibu hamil dan sedang mengonsumsi obat pengencer darah				
11	Ramuan Tradisional untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramuan infused water kurma dan jahe 2. Ramuan jahe, pandan, dan kencur 3. Ramuan kunyit, jeruk nipis dan madu 4. Ramuan jahe emprit/merah, pegagan dan temulawak 5. Ramuan mengkudu dan madu 6. Ramuan meniran 	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020	Poster/ flyer/ media sosial
12	Kegiatan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	<p>Merupakan sebuah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah/gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat, dengan memanfaatkan TOGA dan Keterampilan</p> <p>Kegiatan tersebut termasuk dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelompok asuhan mandiri kestrad</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2017	Power Point
E	SUMBER DAYA KESEHATAN					
1	Rekognisi Pembelajaran lampau	Program percepatan pendidikan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan melalui RPL dari jenjang pendidikan menengah (JPM) DAN Diploma I ke Diploma II, sedangkan RPL sendiri definisinya adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal		Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020	Hard copy/Soft Copy
2	Tugas Belajar	Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lingkungan Kementerian Kesehatan dan UPT nya serta Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD nya makan Kementerian Kesehatan melaksanakan penerimaan peserta tugas belajar dalam negeri SDM Kesehatan Tahun 2018 meliputi Program akademik jenjang D-IV, S-1, Profesi, S-2+ Spesialis, S-3 (khusus pendidik klinis dan Widya Iswara)		Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online
3	PPDS/DGS -BK	Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialisistik dan sub spesialisistik, kemenkes melalui Tim pelaksana dan pengelola program bantuan pendidikan dokter spesialis/drg spesialis melaksanakan penerimaan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/drg spesialis dan sub spesialis	Bidang SDK seksi SDMK	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online
4	Tenaga Kesehatan Teladan	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota berasal dari puskesmas yang telah terakreditasi minimal akreditasi madya meliputi 9 kategori yaitu : Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, nutrisonis, ahli teknis, lab medik, kefarmasian	Bidang SDK seksi SDMK	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Kab-kota yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy
5	PGDS	Pendayagunaan Dokter spesialis adalah penempatan dokter spesialis di RS milik Pemerintah pusat dan pemda, dlm rangka pendayagunaan dr spesialis pemerintah pusat melakukan penempatan dokter spesialis sbg salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Bidang SDK seksi SDMK	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2020 / wahana yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy
6	Pengurusan STR	Pengurusan untuk legalisir STR	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020	Hard copy/Soft Copy

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBIT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
7	Jabatan fungsional	Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang merupakan salah satu syarat jabatan fungsional Nakes untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK)	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/lisan
8	Uji Kompetensi pergerakan jenjang	Dalam upaya memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk setiap pergerakan jabatan fungsional yaitu: pengangkatan pertama jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan fungsional, alih jenjang jabatan dan alih jenjang/alih fungsi maka perlu ada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.	Bidang SDK seksi SDM	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020	Hard copy/lisan
9	Lolos Butuh	Semua lulusan apoteker jatim yang akan bekerja di luar jatim harus mempunyai surat rekomendasi dari Kadinkes	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/Soft Copy
10	Bukti lapor	Surat keterangan lulus sebagai syarat untuk mengurus lolos butuh	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/lisan
11	Koordinasi pelatihan	Pelaksanaan pelatihan dengan sasaran Dinas kesehatan dan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Pelatihan Kesehatan Masyarakat (Latkesmas)	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Latkesmas	Hard copy/Soft Copy
12	PKP Mahasiswa	Praktek kerja pemerintahan / profesi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktek dibawah pengawasan pembimbing	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/Soft Copy
13	Program Dokter Internship	Kegiatan penempatan dokter yang baru lulus sebagai proses pematapan mutu profesi dokter yang menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri dengan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan. Dilakukan 4 periode.	Bidang SDK seksi SDM	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / wahana yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy
14	Penempatan tim dokter spesialis di kepulauan dan koridor madura	Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka kunjungan pelayanan kesehatan spesialis tim dokter spesialis di kepulauan dan koridor madura	Bidang SDK seksi SDM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / RS yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy
15	Penempatan tim dokter residen di kepulauan dan koridor madura	Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka kunjungan pelayanan kesehatan spesialis tim dokter residen di kepulauan dan koridor madura	Bidang SDK seksi SDM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / RS yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy
16	Data tenaga kesehatan	Data tentang tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Jawa Timur	Bidang SDK seksi SDM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	per 3 bulan	online/ offline dan hardcopy
17	Izin Pedagang Besar Farmasi	Pengertian, jenis pedagang besar farmasi, tatacara, persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan izin PBF. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 2. Permenkes RI nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 3. Permenkes RI nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi 4. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
		5. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan				
18	Izin Produksi Obat Tradisional	<p>Pengertian obat tradisional, ketentuan, tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin obat tradisional.</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor : 006 tahun 2012 tentang : Industri dan Usaha Obat Tradisional;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)
19	Registrasi Obat Tradisional (Izin Edar)	<p>Pengertian registrasi, Ketentuan, tatacara dan persyaratannya untuk mendapatkan izin edar.</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor 007 tahun 2012 tentang : registrasi obat tradisional</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
20	Izin Industri Kosmetika	<p>Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin produksi kosmetika.</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi Kosmetika;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)
21	Notifikasi Kosmetika (Izin Edar)	<p>Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin edar atau notifikasi.</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor: 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
22	Izin Industri Farmasi	Pengertian Industri Farmasi, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin Industri.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
		<p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor : 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>				
23	Pelayanan Kefarmasian	<p>Pelayanan Kefarmasian di Apotek:</p> <p>Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik;</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.</p> <p>Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas :</p> <p>Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik;</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>1. Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.</p> <p>Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit:</p> <p>Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP;</p> <p>Pelayanan Farmasi Klinik;</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
24	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	<p>Informasi yang diberikan :</p> <p>Penyelenggaraan metode CBlA;</p> <p>Penggunaan Obat Rasional meliputi :</p> <p>a. Penggolongan obat;</p> <p>b. Informasi pada kemasan dan brosur obat;</p> <p>c. Cara pemilihan dan mendapatkan obat;</p> <p>d. Bentuk sediaan;</p> <p>e. Peringatan perhatian;</p> <p>f. Dosis obat;</p> <p>g. Cara penggunaan obat;</p> <p>h. Efek samping obat;</p> <p>i. Cara penyimpanan obat;</p> <p>j. Obat rusak dan kadaluarsa;</p> <p>k. Cara pembuangan obat.</p> <p>Tata cara pelaksanaan metode CBlA (tujuan dan tahapan kegiatan)</p> <p>Dasar hukum :</p> <p>Kepmenkes RI nomor : HK.02.02/MENKES/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat</p>	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
25	Pelayanan Informasi Keracunan	Informasi tentang tata laksana keracunan (pencegahan dan pertolongan pertama)	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
26	Makanan dan Minuman	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
		Peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan makanan dan minuman; Jenis pangan yang diizinkan untuk PIRT Jenis Bahan Tambahan Pangan (BTP); Bahan yang dilarang ditambahkan pada makanan; Label kemasan; Dasar hukum : 1. UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 2. PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 3. PP nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 4. Permenkes RI noomor 033 tahun 2012 : Bahan Tambahan Pangan				
27	Obat Tradisional	Informasi yang diberikan meliputi : Bahaya bahan kimia obat (BKO) yang ditambahkan pada sediaan obat tradisional; Jenis bahan kimia obat (BKO) yang sering ditambahkan pada obat tradisional; Hal-hal yang dilarang dalam pembuatan obat tradisional. Dasar hukum : Permenkes RI nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
28	Kosmetika	Informasi yang diberikan meliputi : Jenis kosmetika yang termasuk golongan A dan golongan B Bahaya bahan kimia yang dilarang ditambahkan kosmetika. Dasar hukum : Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
29	Obat Publik	Informasi yang diberikan meliputi : 1. Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi Jawa Timur; 2. Rantai manajemen pengelolaan sediaan farmasi mulai dari bahan baku sampai dengan penggunaan sediaan farmasi oleh pasien.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
30	NAPZA	Informasi yang diberikan meliputi : 1. Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi; 2. Penggolongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi Dasar hukum : 1. UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi; 3. Permenkes RI nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; 4. Permenkes RI nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBIT	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
31	E-Report	Informasi yang diberikan meliputi : Tata cara dan alur pelaporan obat setiap triwulan di sarana PBF; Tata cara dan alur pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi setiap bulan di sarana PBF. Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy
32	SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika)	Informasi yang diberikan adalah tata cara dan alur pelaporan narkotika dan psikotropika setiap bulan di sarana pelayanan. Dasar hukum : Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy
33	Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan hasil survey kepuasan kepada pengunjung Seksi Farmasi maupun Gudang Farmasi. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui link: bit.ly/surveykepuasan-kefarmasian dan bit.ly/surveykepuasan-instfarmasi . Laporan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap 1 bulan dan 3 bulan sekali Dasar Hukum: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasian	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy
34	Izin sarana produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , dasar hukum:	Aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Izin Cabang PAK).				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://https://p2t.jatimprov.go.id/
35		Aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK).	Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga		Kasi Alkes dan PKRT	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://sertifikasialkes.kemkes.go.id/
36	Dasar Hukum:	Aplikasi Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK) juga untuk Izin Edar Produk Alat Kesehatan dan PKRT				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://regalkes.depkes.go.id/
37	1. Permenkes RI nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2. Permenkes RI nomor Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3. Permenkes RI nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Tangga.	Sistem informasi berbasis web untuk mengetahui perijinan yang sudah terbit melalui Sistem Registrasi Online yang disebut sebagai Sistem e- Aplikasi pelaporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) ke Kementerian Kesehatan RI Aplikasi e-Report Alat Kesehatan dan PKRT ini dibangun untuk memfasilitasi pelaporan hasil produksi dan penyaluran Alat Kesehatan oleh Produsen atau Penyalur Alat Kesehatan, serta pelaporan hasil produksi atau impor Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) oleh produsen atau importir PKRT.				Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://e-watch.alkes.kemkes.go.id/ Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://e-report.alkes.kemkes.go.id/

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN/PENERBITAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	3	4	5	6	7	8
1	<p>4. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu</p>	<p>Aplikasi ini merupakan rekapitulasi peredaran Alat Kesehatan dan PKRT di dalam / luar negeri serta diharapkan mampu telusur apabila terjadi komplain terhadap penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT</p> <p>Pelayanan Perijinan Terpadu P2T (memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan)</p> <p>Sistem surat keterangan dibangun dengan memperhatikan keberagaman teknologi yang ada, keberagaman kemampuan pengguna, keberagaman infrastruktur yang tersedia. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan ketersediaan software dan hardware dalam melaksanakan kegiatan layanan e-Sistem Surat Keterangan Alat Kesehatan yang menyatukan 10 jenis Surat Keterangan dengan CFS (Certificate Of Free Sale), COE (Certificate of Export) dan HC (Health Certificate)</p> <p>Kebutuhan pengguna dari aplikasi e-Sistem Surat Keterangan Alat Kesehatan akan dikembangkan untuk mendapatkan masukan secara langsung dari pengguna sistem dan kebutuhan sistem di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini nantinya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dunia usaha.</p>				<p>http://www.kemkes.go.id</p> <p>Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://www.p2t.jatimprov.go.id/</p> <p>Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) http://esuka.binfar.kemkes.go.id/portal</p>

Masa Retensi
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
5 Tahun
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan

Masa Retensi
5 Tahun
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan

Masa Retensi
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
Berkelanjutan

Masa Retensi
Berkelanjutan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan

Masa Retensi
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku

Masa Retensi
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
Satu tahun
Tiga tahun
Enam bulan

Masa Retensi
Satu tahun
Satu tahun
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja

Masa Retensi
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
sesuai ketentuan
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku

Masa Retensi
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku

Masa Retensi
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku

Masa Retensi
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
Selama peraturan masih berlaku
Selama peraturan masih berlaku

Masa Retensi